

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Pergolakan Permesta merupakan salah satu rangkaian penting dalam kerangka sejarah nasional Indonesia pada periode transisi politik dari sistem demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin tahun 1957 – 1961.¹ Selama masa pergolakan itu, dampak yang terjadi berimbas terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat baik, sosial, ekonomi, dan politik. Dampak ini sangat dirasakan oleh masyarakat yang menjadi basis-basis pergerakan militer kedua belah pihak (TNI dan tentara Permesta). Tak terkecuali bagi masyarakat Bolaang Mongondow² yang daerahnya menjadi salah satu wilayah pergolakan ketika itu.

Permesta yang lahir sejak diproklamasikan pada tanggal 2 Maret 1957 menjadi sebuah peristiwa yang masih hangat dalam ingatan sebagian masyarakat Bolaang Mongondow yang pernah mengalami masa-masa tersebut. Pengalaman pahit yang mereka rasakan pada masa perang seperti kelaparan, usaha bertahan hidup dalam pelarian di tempat pengungsian, semua itu mereka ceritakan pada anak dan cucu mereka menjelang masa tuanya. Peneliti beranggapan sangat disayangkan

¹ Periode ini didasarkan dalam interpretasi Harvey yang menyebutkan bahwa peristiwa ini merupakan krisis daerah di Indonesia, yang mula-mula menjadi berita mencolok pada bulan Desember 1956 dan memuncak dalam pemberontakan PRRI/Permesta dari tahun 1958 – 1961. Lihat; Barbara Sillars Harvey, 1989. *Permesta; Pemberontakan Setengah Hati*. Jakarta. Pustaka Utama Grafiti, hlm. 1.

² Bolaang Mongondow yang dimaksud dalam tulisan ini adalah suatu kesatuan wilayah kabupaten dengan ibukota di Kotamobagu sebelum adanya pemekaran daerah sejak tahun 2007 silam. Sejak 2007 hingga sekarang Bolaang Mongondow yang dimaksud telah terbagi menjadi empat daerah otonom dan satu kotamadya; yakni Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Bolaang Mongondow Utara, Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Kab. Bolaang Mongondow Timur, dan Kota Kotamobagu.

jika informasi yang masuk dalam kategori sejarah sosial ini tidak direkonstruksi, untuk itu peneliti sengaja melakukan penelitian mengenai Permesta di Bolaang Mongondow dengan pendekatan sejarah sosial-politik.

Secara umum jika kita merujuk dalam buku-buku sejarah Bolaang Mongondow baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun karya para tokoh-tokoh daerah³, mereka membahas Permesta di Bolaang Mongondow terbatas pada masa-masa yang berkecamuk di mana perang sudah berkecamuk yakni tahun (1958 – 1959) atau (1958 – 1961). Padahal sesungguhnya, jika melakukan penelitian yang lebih mendalam maka permasalahan Permesta di daerah ini harus dikaji lebih jauh dari itu, minimal memahami konteks bagaimana tokoh-tokoh daerah telah menjalin hubungan dengan tokoh Permesta sebelum gerakan ini lahir seperti kedekatan antara H.D. Manoppo⁴ dan Permesta hingga konprensi kerja pihak Permesta di Gorontalo pada 20 Juni 1957.

Perjuangan membentuk Kabupaten Bolaang Mongondow sejak tahun 1950⁵ hingga tahun 1954 membuat tokoh-tokoh masyarakat merasa perlu melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh Sulawesi Utara di pusat. Walaupun kedekatan ini

³ Seperti buku yang disusun; A.R. Damopolii, dkk, (2003), *Sejarah Bolaang Mongondow; Untuk SLTP/MTs*. Jakarta. CV Cakra Media, dan buku tulisan H.J.A. Damopolii, 2003, *Dodandian, Kinotanoban dan Kisahku*. Kotamobagu. Yayasan Ibnu Sabil; buku Muh. Dilapanga, 2012. *Serpihan-serpihan Fakta dan Peristiwa di Bolaang Mongondow Tanah leluhurku*. Kotamobagu. Yayasan Totabuan, dan lain-lain.

⁴ Kelak H.D. Manoppo diberikan kepercayaan untuk menjadi Gubernur Sulawesi Utara yang dibentuk secara sepihak oleh Permesta di Gorontalo pada tanggal 20 Juni 1957. Lihat; Barbara Sillars Harvey, (1989). *Permesta: Pemberontakan Setengah Hati*. Jakarta. Pustaka Utama Grafiti, hlm. 94.

⁵ Lihat; H.J.A. Damopolii, 2003, *Dodandian, Kinotanoban dan Kisahku*. Kotamobagu, hlm. 18 – 19, dan; Muh. Dilapanga, 2012. *Serpihan-serpihan Fakta dan Peristiwa di Bolaang Mongondow Tanah leluhurku*. Kotamobagu. Yayasan Totabuan, hlm 28. Tentang perjuangan pembentukan Kab. Bolaang Mongondow.

tidak bisa dilepaskan dari kemenangan Masyumi di Bolaang Mongondow pada tahun 1955 yang notabene partai ini memang terbukti mendukung gerakan otonomi-otonomi daerah di luar pulau Jawa. Pemilihan konstituante tahun 1955 dan gerakan Permesta yang dimulai sejak tahun 1957 menyisahkan satu tahun di mana masa ini yang menjadi pemicu situasi politik yang memanas yakni tahun 1956, sehingga sangat menarik memulai perodesasi penelitian mengenai Permesta di Bolaang Mongondow dimulai dari tahun tersebut 1956.

Keadaan sosial-ekonomi di Sulawesi sejak tahun 1950 an bergantung pada penghasilan kopra.⁶ Hal ini juga terjadi di Bolaang Mongondow di mana secara umum masyarakat di sana mengantungkan sumber ekonomi dari hasil penjualan kopra. Untuk menganalisis keadaan sosial pada masa Permesta, tidak menarik jika langsung melompat pada tahun 1958 di mana keadaan genting dan kekacauan telah terjadi akibat dan dampak pergolakan Permesta pada tahun 1958 – 1961. Hal ini sejatinya harus dilihat minimal satu tahun sebelum lahirnya Permesta (1957) yakni tahun 1956 agar bisa memberikan gambaran mengenai kehidupan sosial masyarakat Bolaang Mongondow sebelum masa-masa kekacauan terjadi. Tahun 1956 – 1963 adalah periode yang tepat untuk meneliti bagaimana kehidupan masyarakat Bolaang Mongondow sebelum dan sesudah pergolakan itu terjadi.

Pada tahun 1958 – 1961 Bolaang Mongondow terjerat dalam pemberontakan yang menamakan dirinya PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) yang berpusat di Kota Padang Sumatera Barat dan apa yang di

⁶ Lihat; Barbara Sillars Harvey, 1989. *Permesta; Pemberontakan Setengah Hati*. Jakarta. Pustaka Utama Grafiti, hlm. 1.

namakan Permesta (Perjuangan Semesta) yang berpusat di Manado. Pada saat itu Bolaang Mongondow dijadikan sebagai basis pertahanan terakhir, akibatnya rakyat Bolaang Mongondow yang menderita dibandingkan daerah Gorontalo dan Minahasa.⁷ Penjelasan di atas dianggap sangat menarik dan tepat untuk menjadikan Bolaang Mongondow menjadi tempat yang dipilih untuk penelitian ini karena beberapa hal antara lain, pertama; Bolaang Mongondow adalah daerah asal peneliti, kedua; Bolaang Mongondow menjadi daerah yang dikambing hitamkan dalam pergolakan Permesta, alasannya karena masyarakat Bolaang Mongondow sebenarnya tidak ingin terlibat langsung dalam gerakan tersebut. Akhirnya Bolaang Mongondow menjadi medan tempur antara Permesta dan tentara pusat yang berdampak langsung pada masyarakat,⁸ dan ketiga; Bolaang Mongondow jarang diangkat dalam peristiwa tersebut, padahal dampak kerugian dan kerusakan paling parah akibat pergolakan tersebut terjadi di daerah ini.

Menurut Ventje Sumual, Permesta lahir akibat terjadinya ketimpangan-ketimpangan dalam permasalahan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia yang dirasa oleh sebagian masyarakat yang ada di wilayah timur Nusantara. Permesta (Perjuangan Semesta) dicetuskan di Makassar melalui Proklamasi 2 Maret 1957. Ia tidak merupakan bagian dari suatu gerakan regional lain. Ia merupakan suatu

⁷ A.R. Damopolii, dkk, (2003), *Sejarah Bolaang Mongondow; Untuk SLTP/MTs*. Jakarta. CV Cakra Media, hlm. 55.

⁸ Masyarakat Bolaang Mongondow menganggap Permesta hanya bentuk penguasaan secara militer terhadap mereka oleh orang-orang Minahasa. Kekecewaan masyarakat Bolaang Mongondow terhadap Permesta memuncak ketika Kotamobagu dan beberapa wilayah lain di Bolaang Mongondow di bumi hanguskan oleh tentara Permesta sesaat setelah pasukan pusat dari Batalyon Brawijaya dan Siliwangi menduduki Kotamobagu pada tanggal 18 September 1958. Lihat buku Barbara Sillars Harvey. (1989). *PERMESTA, Pemberontakan Setengah Hati*. Jakarta. Pustaka Utama Grafiti, hlm. 160.

Gerakan Mandiri yang mempunyai sifat dan watak yang khusus, bila dibanding dengan yang ada di wilayah lain. Walaupun penentuan waktu dan tanggal pencanangan dimulainya gerakan itu, tidak dapat dilepaskan dari pengaruh “pergolakan daerah” yang sebelumnya telah meletus di Sumatera.⁹

Pemerintah pusat bukannya sama sekali tidak memperhatikan tuntutan daerah dan bahkan berupaya memenuhi kepentingan-kepentingan yang dianggapnya wajar dan lumrah. Puncak sifat akomoditif pemerintah pusat terjelma dalam Undang-Undang No. 1 tentang pemerintahan daerah yang diumumkan pada bulan Januari 1957. Undang-undang itu antara lain memuat ketentuan tentang pemilihan dewan perwakilan rakyat daerah dan kepala daerah. Sebagaimana diketahui, pada tanggal 2 Maret 1957 arus deras itu diperkuat dengan lahirnya Permesta di Makasar. Suasana politik menjadi semakin gawat yang selanjutnya mendorong pemerintahan pusat mengumumkan keadaan darurat bagi seluruh wilayah Indonesia pada bulan Maret itu juga. Dengan Pengumuman itu berarti bahwa Undang-Undang No. 1 tahun 1957 tidak sempat dilaksanakan.¹⁰

Merekonstruksi tentang bagaimana keadaan sosial-politik masyarakat di daerah Bolaang Mongondow pada masa pergolakan Permesta merupakan bagian dari kajian sejarah sosial. Walaupun dalam mempelajari sejarah, selalu terbentur pada masalah pokok yang selalu harus disadari, yaitu masalah subjektivitas dan

⁹ H.N. Ventje Sumual, (1999), *Permesta: Gerakan Yang Dilahirkan Pemikiran Kritis Menyatu dengan Praxis Kehidupan Sosial Politik*, Jurnal Studi Amerika Vol. IV Januari – Juli 1999. <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/90432-JSAM-IV-JanJul1999-15.pdf>. 28 Februari 2017 (18:51), hlm. 17.

¹⁰ Barbara Sillars Harvey, (1989), *Permesta: Pemberontakan Setengah Hati*. Jakarta. Pustaka Utama Grafiti, hlm. XI-XII.

objektivitas. Secara singkat yang dinamakan “sejarah” adalah semua kejadian dan peristiwa serta semua hasil pikiran dan perjuangan manusia yang telah lampau dari abad ke abad sepanjang zaman.¹¹ Karena ruang lingkup sejarah tidak terbatas sepanjang zaman, maka pengetahuan yang dibutuhkan juga tidak lantas dibatasi oleh zaman. Bagi peneliti pengetahuan mengenai keadaan sosial masyarakat di masa lalu tidak bisa dilepaskan atau dilupakan. Baik permasalahan maupun subyek dan pendekatan pengkajian sejarahnya mengalami perubahan, dan pembaharuan, kesemuanya menuntut proses rekonstruksi sejarah nasional terus menerus.¹²

Gambaran mengenai kehidupan masyarakat Bolaang Mongondow dalam masa pergolakan Permesta diharapkan bisa menjadi salah satu sumbangan penelitian mengenai sejarah Bolaang Mongondow yang masih kurang pada masa ini. Hal ini dimaksudkan agar sejarah tidak terkesan ibaratnya hanya untuk menghormati masa lalu yang telah lewat sebagai hiasan yang indah untuk dinikmati dan dipamerkan, bukan masa lalu sebagai pelajaran atau warisan intelektual untuk memahami kekinian dan merancang masa depan yang lebih baik.¹³ Hal di atas juga menyangkut tentang bagaimana sikap seorang sejarawan dalam menentukan apa yang dinamakan fakta sejarah, karena fakta-fakta dasar itu tidak berdasarkan pada

¹¹ Sudiyo, (2004), *Perhimpunan Indonesia*. Jakarta. PT Bina Adiaksara & PT Rineka Cipta, hlm. viii.

¹² Sartono Kartodirdjo, (1999), *Ideologi Bangsa dan Pendidikan Sejarah*. Dalam Buku Taufik Abdullah, dkk, *Sejarah: Pemikiran, Rekonstruksi, Persepsi*. Jakarta. MSI & Arsip Nasional Republik Indonesia, hlm. 24.

¹³ Bambang Purwanto, (2013), *Menulis Kehidupan sehari-hari Jakarta: Memikirkan Kembali Sejarah Sosial Indonesia*. Dalam Buku; Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto, Ratna Saptari (eds), *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 249.

kualitas apapun dalam fakta-fakta itu, tetapi pada keputusan apriori sejarawan.¹⁴ Kenyataannya juga bahwa fakta-fakta hanya berbicara ketika sejarawan memanggilmnya; adalah sejarawan yang memutuskan fakta-fakta mana saja yang akan ditampilkan.¹⁵ Saat ini masih perlu kiranya melakukan penelitian lebih mendalam tentang Permesta di Bolaang Mongondow sebagai sumbangsih mengenai pengembangan sejarah lokal di sana yang masih sangat kurang.

B. Rumusan Masalah

Di atas telah dijelaskan hal-hal yang melatar belakangi penelitian ini. Untuk itu peneliti merasa perlu menguraikan rumusan masalah dalam rancangan penelitian ini yakni:

1. Bagaimana dinamika politik pada masa Permesta mempengaruhi kondisi sosial masyarakat Bolaang Mongondow pada tahun 1956 - 1963?
2. Bagaimana kondisi masyarakat Bolaang Mongondow pada masa pergolakan berlangsung hingga pasca Permesta tahun 1956 - 1963?

¹⁴ E.H. Carr, (2014), *Apa Itu Sejarah* (diterjemahan oleh Komunitas Bambu). Depok. Komunitas Bambu, hlm. 7.

¹⁵ E.H. Carr, *Ibid*, hlm. 8.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka uraian tujuan penelitian ini yakni :

1. Untuk mengkaji bagaimana dinamika politik pada masa Permesta mempengaruhi kondisi sosial masyarakat Bolaang Mongondow pada tahun 1956 – 1963.
2. Untuk mengetahui kondisi masyarakat Bolaang Mongondow pada masa pergolakan berlangsung hingga pasca Permesta tahun 1956 – 1963.

D. Ruang Lingkup

1) Aspek Temporal

Ruang lingkup temporal adalah batasan waktu yang dipilih dalam penelitian. Karena kajian penelitian ini dimulai dari sebelum masa pergolakan Permesta maka oleh peneliti mengambil sebuah kesimpulan untuk menentukan aspek temporal dalam penelitian nanti yakni pada tahun (1956 – 1963). Hal ini berdasarkan pada suatu fakta bahwa Permesta (Perjuangan Semesta) dicetuskan di Makassar melalui Proklamasi 2 Maret 1957,¹⁶ walaupun ada sebagian yang mengatakan bahwa pergolakan tersebut terjadi pada kurun waktu tahun 1958 - 1961.¹⁷ Adapaun sejarawan R.Z. Leirisa berpendapat bahwa tinjauan historis PRRI

¹⁶ H.N. Ventje Sumual, *Op. Cit*, hlm. hlm. 17.

¹⁷ Saafroedin Bahar, (1999), PRRI-Permesta: Sebuah Kasus Keterkaitan antara Masalah Integrasi Nasional dan Perang Dingin, *Jurnal Studi Amerika* Vol. IV Januari – Juli 1999. <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/90433-JSAM-IV-JanJul1999-28.pdf>. 28 Februari 2017 (18:53), hlm. 28.

– Permesta sebenarnya harus dilihat sebagai bagian dari revolusi Indonesia yang berlangsung antara 1945 hingga 1949, karena kenyataannya menunjukkan bahwa tahun 1949 tidak serta-merta mengubah segala hal, lebih-lebih lagi struktur sosial.¹⁸ Sementara itu jika kita merujuk pada buku Sejarah Bolaang Mongondow untuk SLTP/MTs di situ dijelaskan juga bahwa pergolakan Permesta di Bolaang Mongondow mulai berlangsung sejak tahun 1958 – 1961. Dari beberapa referensi tersebut, maka batasan temporal yang dipilih dalam rancangan penelitian ini yakni tahun 1956 – 1963 sangat tepat digunakan untuk mengkaji peristiwa tersebut baik sebelum hingga pasca pergolakan Permesta berlangsung.

Dari aspek temporal yang dipilih oleh penulis (1956 - 1963), akan dilihat bagaimana keadaan sosial masyarakat sebelum awal pergolakan yang akan membahas tentang tatanan sosial, kehidupan sosial, pada masa-masa damai. Selanjutnya pembahasan juga akan masuk pada kehidupan sosial sehari-hari masyarakat ketika pergolakan terjadi hingga pasca Permesta. Segi kehidupan masyarakat yang akan dibahas nanti ditentukan dengan data-data yang didapat penulis di lapangan ketika proses penelitian berlangsung.

2) Aspek Spasial

Batasan spasial yang dipilih oleh penulis yakni wilayah Bolaang Mongondow sebelum adanya otonomi daerah pada masa reformasi. Bolaang

¹⁸ R.Z. Leirisa, (1999), *PRRI-Permesta: Tinjauan Historiografis*, Jurnal Studi Amerika Vol. IV Januari – Juli 1999. <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/90435-JSAM-IV-JanJul1999-56.pdf>. 28 Februari 2017 (18:56), hlm. 61.

Mongondow sebagai salah satu daerah yang dengan resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950, adalah daerah yang telah melewati sejarah yang panjang menyangkut pelaksanaan sistem politiknya.¹⁹ Jadi dapat disimpulkan bahwa Bolaang Mongondow yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kesatuan wilayah sebelum adanya pemekaran daerah sejak tahun 2007 silam di mana dalam pemekaran tersebut Bolaang Mongondow melahirkan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kota Kotamobagu, kemudian pada pemekaran tahun 2009 dimekarkan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Bolaang Mongondow Selatan. Penelitian ini mencakup seluruh wilayah Bolaang Mongondow yang mencakup daerah seluas kurang lebih 8.359.04 Km² (berdasarkan surat Keputusan Mendagri No. 185.5.1987).²⁰ Wilayah ini dahulu merupakan bekas Kerajaan Bolaang Mongondow sampai tahun 1954.²¹

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah berusaha melakukan beberapa peninjauan data-data dan sumber tertulis baik buku, jurnal, dan skripsi sebagai bahan referensi yang dianggap memiliki relevansi dan sebagai bahan bandingan dengan penelitian ini. Dari peninjauan yang telah dilakukan, penulis mencoba untuk

¹⁹ Mohamad Baharudi Podomi. 2010. *Sistem Politik Kerajaan Bolaang Mongondow di Sulawesi Utara*. Tesis. Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta., hlm. 3.

²⁰ A.R. Damopolii, *Op. Cit.* hlm. 87

²¹ Tahun 1954 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1954 Tanggal 23 Maret 1954, di mana Bolaang Mongondow ditetapkan sebagai daerah otonomi yakni daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri setingkat kabupaten. Lihat; A.R. Damopolii, *Ibid.* hlm. 77.

mencari sumber-sumber tersebut di perpustakaan pusat UNG, perpustakaan daerah Kota Kotamobagu, perpustakaan Jurusan Sejarah UNG, serta buku dari beberapa dosen dan senior di Jurusan Sejarah. Dari beberapa karya tersebut dipilihlah yang paling relevan untuk ditinjau seperti yang tertulis pada uraian di bawah ini:

Buku yang berjudul; *Permesta: Pemberontakan Setengah Hati* yang ditulis oleh Barbara Sillars Harvey, cetakan ke dua terbitkan PT. Pustaka Utama Garfiti, Jakarta 1989. Buku ini mencoba merekonstruksi kembali sebab-akibat dari peristiwa Permesta dengan mengulasnya dari skala nasional hingga lokal, dan banyak memberikan gambaran mengenai jalannya pertempuran-pertempuran antara pihak TNI dan Permesta. Relevansi buku ini dengan penelitian yakni pada ulasan mengenai Permesta di Sulawesi Utara secara umum dan membahas juga tentang bagaimana Permesta di Bolaang Mongondow sehingga informasi di dalam buku ini dianggap sangat penting untuk penelitian. Adapun perbedaan mendasar buku ini dengan penelitian yakni, buku ini ketika mengulas Permesta di Bolaang Mongondow hanya merekonstruksi gerakan militer dan berbagai kebijakan politik yang terjadi, sementara penelitian ini justru menjadi kebalikannya, yakni merekonstruksi akibat-akibat yang dirasakan rakyat karena kebijakan politik dan gerakan militer pada masa itu.

Buku berjudul *Permesta; Dalam Romantika, Kemelut, dan Misteri* ditulis oleh Phill M. Sulu yang diterbitkan oleh PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2011. Penulis buku ini adalah bekas tentara Permesta yang menjadi saksi keadaan sekitar pergolakan pada waktu itu. Seluruh pengalaman yang disaksikan bahkan dirasakan oleh penulis tercatat di atas lembaran demi lembaran buku ini. Buku ini

memiliki relevansi dalam penelitian karena menguraikan secara jelas bukan hanya kondisi peperangan saja, tetapi kondisi sosial, ekonomi, bahkan politik baik dari skala nasional maupun skala lokal di daerah-daerah yang sedang bergolak sesuai dengan apa yang penulis ketahui selama pergolakan sedang berlangsung. Adapun yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini yakni pada aspek spasialnya di mana buku ini lebih banyak menguraikan kondisi yang terjadi di daerah Minahasa, sementara penelitian ini terfokus di daerah Bolaang Mongondow untuk mengkaji dari segi sosial-politik.

Buku *Sejarah Bolaang Mongondow; Untuk SLTP/MTs* yang disusun oleh A.R. Damopolii, dkk, diterbitkan oleh CV. Cakra Media, Jakarta 2003. Buku ini menjelaskan tentang bagaimana asal-usul masyarakat Bolaang Mongondow yang sejak dahulu kala telah menjadi bagian dari tatanan masyarakat di pulau Sulawesi secara umum. Buku ini memberi pemahaman kepada pelajar-pelajar daerah tentang bagaimana peran perjuangan rakyat Bolaang Mongondow sejak pemerintahan raja-raja (kerajaan) dalam rangka mengembangkan khasanah budaya, politik dan pemerintahan untuk memperjuangkan kemerdekaan republik Indonesia sejak zaman penjajahan hingga mempertahankan kemerdekaan secara bulat dan utuh yang kita rasakan saat ini. Buku ini memiliki relevansi dengan penelitian karena cukup banyak memuat mengenai gambaran kehidupan masyarakat Bolaang Mongondow dari segi sosial-politik. Namun perbedaan dengan penelitian ini adalah, penelitian ini lebih menghususkan pada bagaimana Permesta di Bolaang Mongondow pada kurun waktu tahun 1956 – 1963 yang ditinjau dari sosial-politik.

Sementara dalam buku ini hanya sedikit menjelaskan tentang Permesta yang bahkan hanya kurang dari satu halaman.

Buku *Dodandian, Kinotanoban dan Kisahku* yang ditulis oleh H.J.A Damopolii mantan Bupati Bolaang Mongondow (1981 – 1991), diterbitkan oleh Yayasan Ibnu Sabil, di Kotamobagu tahun 2003. Buku ini merupakan memoar pribadi beliau yang membahas tentang kebudayaan dan falsafah hidup masyarakat Bolaang Mongondow. Di dalam buku ini dijelaskan juga mengenai sejarah Bolaang Mongondow dalam ruang lingkup birokrasi sejak masa kerajaan hingga saat ini. Nilai di dalamnya berisi pengalaman pribadi beliau selama mengabdikan untuk bangsa dan negara di daerah tercintanya. Perbedaan buku ini dengan penelitian yakni buku ini disusun untuk menjelaskan nilai-nilai sejarah dari aspek budaya dan hanya sedikit bahasan tentang Permesta di Bolaang Mongondow. Adapun relevansinya yakni pada aspek politik dan pemerintahannya, di samping itu buku ini juga berisi berbagai macam gambaran peristiwa mengenai Permesta di Bolaang Mongondow walaupun informasinya cukup terbatas. Penulis beranggapan bahwa buku ini sangat menarik untuk dikaji khususnya jika kita menulis mengenai sejarah Bolaang Mongondow.

Buku *Dari Kampung Mengukir Asa, Mengabdikan Pada Negeri; Memoar Anak Desa Bilalang* karangan Abdullah Mokoginta yang merupakan salah satu putra terbaik daerah yang pernah menjabat sebagai wakil Gubernur Sulawesi Utara. Buku ini diterbitkan di Bekasi oleh Bolmong Press pada tahun 2010. Seperti dalam judul bukunya, buku ini menceritakan tentang memoar pribadi beliau sejak masih usia kanak-kanak hingga berproses sebagai abdi negara di negeri ini. Buku ini juga

banyak menceritakan tentang hal-hal yang beliau lihat langsung mengenai kehidupan masyarakat Kotamobagu di zaman Jepang hingga keadaan daerah pada masa pergolakan Permesta. Buku ini memiliki relevansi dengan penelitian karena berisi informasi penting mengenai keadaan sehari-hari masyarakat dari aspek historis dan di dalam buku ini juga dijelaskan keadaan daerah Bolaang Mongondow pada masa Permesta dari apa yang beliau lihat langsung. Perbedaan antara penelitian dan buku ini yakni penelitian ini memang spesifik meneliti tentang sejarah Permesta, sementara buku ini hanya mengulas tentang memoar pribadi beliau. Walaupun begitu, penulis merasa sangat tepat mengkaji buku ini, terlebih untuk kepentingan penelitian ini.

Buku *Serpihan-serpihan Fakta dan Peristiwa di Bolaang Mongondow Tanah Leluhurku* yang ditulis oleh Muh. Dilapanga, seorang jurnalis senior di Bolaang Mongondow sekaligus tokoh masyarakat daerah setempat. Buku ini diterbitkan pada tahun 2012 oleh Yayasan Totabuan. Buku ini berisi penggalan-penggalan sejarah Bolaang Mongondow yang masih kontroversi di kalangan sebagian masyarakat di sana. Berdasarkan pengalaman beliau, serta pemahaman yang luas akan nilai-nilai historis daerah Bolaang Mongondow beliau bahkan berani menghadirkan informasi baru tentang sejarah daerah berdasarkan tradisi lisan yang masih sangat dijunjung tinggi dalam mengungkap sejarah dan kebudayaan masyarakat Bolaang Mongondow. Di dalam buku ini beliau menggambarkan kondisi masyarakat Bolaang Mongondow sejak masa kemerdekaan hingga saat ini. Isi buku ini juga menggambarkan tentang kondisi daerah di masa pergolakan Permesta sehingga memiliki relevansi dengan

penelitian. Perbedaan mendasar antara penelitian dan buku ini yakni pada fokus penelitian di mana skripsi ini merekonstruksi sejarah Permesta di Bolaang Mongondow, sementara buku ini hanya fokus mengulas sejarah Bolaang Mongondow dari masa kerajaan hingga pendudukan kolonial Belanda.

Kumpulan Jurnal dalam website Perpustakaan UI (www.lib.ui.ac.id), yakni Jurnal studi Amerika 4 Januari-Juli 1999 yang berjudul *Permesta: Gerakan Yang Dilahirkan Pemikiran Kritis Menyatu Dengan Praxis Kehidupan Sosial Politik*, (<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/90432-JSAM-IV-JanJul1999-15.pdf>) hal. 15-27, Jurnal ini adalah tulisan langsung H.N. Ventje Sumual; Tulisan Saafroedin Bahar yang berjudul *PRRI-Permesta: Sebuah Kasus Keterkaitan Antara Masalah Integrasi Nasional dan Perang Dingin*, (<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/90433-JSAM-IV-JanJul1999-28.pdf>) hlm. 28-49; Tulisan Retno S. Mamoto, yang berjudul *Perspektif Amerika Hubungan Amerika-Indonesia: Kasus PRRI Dalam Empat Media Cetak New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Time*, (<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/90438-JSAM-IV-JanJul1999-123.pdf>) hlm. 123-144; Tulisan Retno S. Mamoto yang berjudul *PRRI/Permesta Dalam Empat Media Cetak di Amerika Serikat*. (<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/90434-JSAM-IV-JanJul1999-50.pdf>) hlm. 50-55; dan terakhir tulisan sejarawan R.Z. Leirissa yang berjudul; *PRRI-Permesta: Tinjauan Historiografis*, (<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/90435-JSAM-IV-JanJul1999-56.pdf>) hlm. 56-72. Dalam jurnal ini dikupas berbagai pandangan mengenai Permesta dari berbagai perspektif dengan analisis dari orang-orang yang mumpuni dalam masalah tersebut baik yang terlibat langsung (Ventje Sumual), sejarawan, dan akademisi yang

mencoba meluruskan segala hal-hal yang dianggap salah mengenai Permesta selama masa pemerintahan orde lama dan orde baru sesuai sudut pandang para penulis. Intisari tulisan ini sebenarnya menjelaskan berbagai hal yang melatar belakangi kemunculan Permesta hingga keadaan yang terjadi setelahnya dari tinjauan politik sehingga memiliki relevansi dalam penelitian nanti. Kumpulan jurnal ini memiliki relevansi dengan penelitian skripsi ini.

Skripsi Murdani Mokodongan alumni mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah, UNG yang berjudul *Permesta di Bolaang Mongondow 1958-1961 (Studi di Kecamatan Bilalang)*²², Gorontalo 2014. Skripsi ini membahas tentang bagaimana persepsi masyarakat Bolaang Mongondow di Kecamatan Bilalang tentang pasukan Permesta yang pada masa pergolakan tinggal di wilayah ini. Beragam persepsi masyarakat dalam penelitian ini berujung pada sebuah kesimpulan bahwa Permesta di Bolaang Mongondow banyak menyengsarakan masyarakat asli di daerah tersebut, dan khususnya di Kecamatan Bilalang. Skripsi di atas memiliki relevansi dengan penelitian ini karena meneliti tentang bagaimana persepsi masyarakat Bolaang Mongondow tentang Permesta pada masa itu. Persepsi masyarakat muncul akibat dari gejala-gejala sosial yang terjadi ketika pergolakan sedang berlangsung. Adapun yang menjadi perbedaan mendasar dengan

²² Kecamatan Bilalang pada masa pergolakan Permesta masih merupakan sebuah desa dengan wilayah yang sangat luas mencakup Desa Bilalang I, Desa Bilalang II, Desa Bilalang III, Desa Bang VI, Desa Apado', dan Desa Tudu Aog, di mana semua desa tersebut masuk di Kecamatan Passi Kabupaten Bolaang Mongondow. Mungkin penulis (Murdani Mokodongan) menggunakan batasan spasial di atas yakni Kecamatan Bilalang mengacu pada peraturan pemerintah Bolaang Mongondow berdasarkan SK. Bupati No. 40 tanggal 20 Februari 2007. Lihat; Murdani Mokodongan, 2014. Skripsi; *Permesta di Bolaang Mongondow 1958 – 1961 (Penelitian di Kecamatan Bilalang)*. UNG. Jurusan Pend. Sejarah, hlm. 34–35.

penelitian ini lebih kepada aspek spasial di mana penelitian ini akan meneliti peristiwa Permesta di seluruh wilayah Bolaang Mongondow, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya terfokus di Kecamatan Bilalang saja. Perbedaan lain dengan penelitian ini adalah dari metode penelitian yang digunakan, di mana penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, sementara penelitian sebelumnya menggunakan model penelitian kualitatif.

F. Kerangka Teoretis dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan studi sosial-politik sebagai analisis untuk merekonstruksi peristiwa pergolakan Permesta di Bolaang Mongondow pada tahun 1956 – 1963. Penelitian ini mencoba mensingkronkan tentang bagaimana pengaruh keadaan politik pada masa Permesta terhadap keadaan sosial masyarakat Bolaang Mongondow. Sebagaimana yang terkandung dalam namanya, sejarah sosial mengkaji sejarah masyarakat (atau kemasyarakatan).²³ Hal ini karena, dalam penelitian ini peneliti akan berfokus untuk meneliti bagaimana kondisi sehari-hari masyarakat Bolaang Mongondow ketika terjadinya pergolakan Permesta.

Kehidupan sehari-hari masyarakat harusnya tidak bisa dipisahkan dalam kajian sejarah, karena kehidupan sehari-hari masyarakat menciptakan perubahan, sementara perubahan tidak bisa dipisahkan dalam ruang dan waktu sehinggalah setiap segi kehidupan masyarakat sebenarnya adalah bagian dari sejarah itu sendiri.

²³ Helius Sjamsuddin, (2012), *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta. Ombak, hlm. 241.

Hal di atas sejalan dengan pendapat seorang sejarawan Inggris Hobsbawn dia berpendapat bahwa:

Sejarah sosial mengkaji: sejarah dari orang miskin atau kelas bawah; gerakan-gerakan sosial; berbagai kegiatan manusia seperti tingkah-laku, adat-istiadat, kehidupan sehari-hari; sejarah sosial dalam gabungannya dengan sejarah ekonomi.²⁴

Kehidupan sehari-hari masyarakat jika telah dihubungkan dengan suatu peristiwa dengan aspek temporal yang jelas akan menjadi suatu hal yang menarik untuk kajian sejarah sosial, sementara itu mengenai kehidupan sehari-hari masyarakat di tengah gejolak konflik vertikal antara pemerintah dan Permesta sangat sulit dilepaskan dengan suatu hal yang berhubungan dengan politik. Hal ini diungkapkan oleh sejarawan Inggris Asa Briggs ketika mencoba mendefinisikan tentang arti kajian sejarah sosial ia menyebutnya “Sejarah sosial bukan sebagai sejarah dengan membuang politiknya melainkan sebagai sejarah ekonomi dengan memasukan politik ke dalamnya”.²⁵ Sejalan dengan pendapat tersebut, sejarawan E. Callot berpendapat bahwa “Sejarah adalah suatu sains deskriptif yang mengkaji suatu masyarakat tertentu secara keseluruhan dalam aspek temporalnya.”²⁶ Sejarawan Lucien Febvre juga berpendapat bahwa “Sejarah mengkaji bukan orang, manusia (*man*), melainkan masyarakat-masyarakat manusia (*human societies*), dengan kelompok-kelompok terorganisasi (*organized groups*)”.²⁷

²⁴ Hobsbawn, dalam Helius Sjamsuddin, *Ibid*, hlm. 243.

²⁵ Bezucha, dalam Asa Briggs, dalam Helius Sjamsuddin, *Ibid*, hlm. 242.

²⁶ Callot, dalam Helius Sjamsuddin, *Ibid*, hlm. 6.

²⁷ Lucien Febvre, dalam Helius Sjamsuddin, *Ibid*.

Teori-teori politik sangat penting dalam penelitian ini karena penelitian ini mencoba merekonstruksi bagaimana keadaan politik pada masa pergolakan Permesta mempengaruhi kehidupan sosial pada saat itu. Hubungan antara ilmu politik dan ilmu sejarah sangat memiliki keterkaitan satu sama lain bahkan dalam kajian politik sendiri sejarah sangat diperlukan untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan di masa lalu. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik, oleh karena menyumbang bahan, yaitu data dan fakta dari masa lampau, untuk diolah lebih lanjut.²⁸ Menurut Miriam Budiardjo “Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau *politics* atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik”.²⁹ Sementara oleh Peter Merkl dia mendefinisikan bahwa “Politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan (*Politics, at its best is a noble quest for a good order and justice*)”.³⁰ Dari definisi di atas Miriam Budiardjo kembali mempertegas bahwa:

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (*Politics*) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha menggapai *the good life* ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu.³¹

²⁸ Miriam Budiardjo, (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 25-26.

²⁹ Miriam Budiardjo, *Ibid*, hlm. 13.

³⁰ Peter Merkl dalam Miriam Budiardjo, *Ibid*, hlm. 15.

³¹ Miriam Budiardjo, *Ibid*.

Meskipun secara umum diketahui bahwa tujuan dari politik adalah baik, namun sifat dan karakter yang beragam dari manusia yang tercermin dari sifat positif dan negative membuat tujuan politik itu mengarah pada kehendak manusia ketika menggunakan ilmu politik tersebut. Ilmu politik memiliki banyak istilah antara lain: Kultur politik (*political culture*), organisasi, sistem politik, demokrasi, konstitusi, *bargaining*, birokrasi, karisma, *patron-client*, kepemimpinan, korupsi.³² Dari istilah-istilah politik di atas, kepemimpinan memiliki keterkaitan erat dengan kekuasaan yang untuk mencapainya terkadang manusia cenderung menghalalkan segala cara. Tidak heran jika dalam realitas sehari-hari kita acapkali berhadapan dengan banyak kegiatan yang tak terpuji, atau seperti dirumuskan oleh Peter Markl sebagai berikut: “Politik, dalam bentuk yang paling buruk, adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri (*Politics at its worst is a selfish grab for power, glory and riches*)”³³ Singkatnya, politik adalah perebutan kuasa, takhta, dan harta.³⁴

Menurut Rod Hague et al: “politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang berisifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya (*Politics is the activity by which groups reach binding collective decisions through attempting to reconcile differences among their members.*)”³⁵

³² M. Dien Madjid dan Johan Wahyudhi, (2014), *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*. Jakarta. Prenada Media Group, hlm. 203.

³³ Peter Merlk dalam Miriam Budiardjo, *Op. Cit*, hlm. 16.

³⁴ Miriam Budiardjo, *Ibid.*

³⁵ Rod Hague et al dalam Miriam Budiardjo, *Ibid.*

Berbeda dengan pendapat di atas, bagi sarjana ilmu politik lainnya seperti Andrew Heywood dia berpendapat bahwa:

“Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemenkan peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama (*Politics is the activity through which a people make, preserve and amend the general rules under which they live and as such is inextricably linked to the phenomenon of conflict and cooperation*)”.³⁶

Jelaslah sudah bahwa meski arti kajian dan batasan-batasan mengenai ruang lingkup sejarah sosial dan definisi mengenai politik memiliki penafsiran yang berbeda-beda, namun untuk meneliti kehidupan sehari-hari masyarakat melalui sudut pandang ke dua bidang ilmu tersebut ke dalam kajian sejarah sosial-politik adalah hal yang bisa dibenarkan dan diterima karena memiliki dasar yang jelas di kalangan sejarawan.

Kehidupan sehari-hari masyarakat dalam kondisi perang memiliki keterkaitan yang erat dengan teori-teori Konflik, sehingganya pendekatan-pendekatan ilmu sosiologi yang menjelaskan mengenai konflik sosial juga diperlukan dalam penelitian ini. Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodihardjo menjelaskan bahwa:

Menurut para ahli, konflik adalah salah satu unsur proses sosial. Konflik melibatkan dua orang atau lebih, atau melibatkan dua orang atau lebih, atau melibatkan suatu kesatuan sosial atau lebih di dalam suatu pertentangan, perlawanan atau perebutan. Dalam hal ini, konflik merupakan pertentangan, perlawanan atau perebutan antarindividu atau antarkesatuan sosial dengan motif dasar yang berbeda, sesuai dengan struktur sosial dan pandangan hidup para pelakunya.³⁷

³⁶ Andrew Heywood dalam Miriam Budiardjo, *Ibid.*

³⁷ Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodihardjo, (2014), *Metode Penelitian Sosial (edisi revisi)*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 128.

Definisi di atas sangat memiliki relevansi dengan peristiwa Permesta yang menjadi topik penelitian ini. Dampak konflik di atas terhadap masyarakat kelas bawah sangat jarang ditulis dalam perspektif sejarah sosial, padahal peristiwa tersebut memiliki dampak yang luas dari berbagai segi baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional, akhirnya peristiwa Permesta hanya selalu berputar pada masalah gerakan militer. Akibat suatu kepentingan kelompok tertentu, elit-elit politik, permasalahan kehidupan dan ketentraman masyarakat terkadang diabaikan begitu saja, karena itu Bogardus memberikan pandangan dalam definisi konflik, dia mengatakan “Secara umum konflik sosial, bisa terjadi oleh adanya pertentangan yang disebabkan oleh faktor ekonomi, kehormatan, status, dan legalitas.”³⁸ Sejalan dengan pandangan di atas, Lewis. A. Coser mencoba membagi konflik, dia menjelaskan:

Konflik yang terjadi di dalam suatu kesatuan sosial dan konflik yang terjadi di antara kesatuan-kesatuan sosial yang berbeda. Yang menjadi penyebabnya, menurut Coser, ialah pertentangan nilai-nilai budaya, pertentangan kepentingan, perbedaan pendapat di antara kesatuan-kesatuan sosial tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang dirasakan patut untuk dilakukan, juga tuntutan-tuntutan akan kedudukan, kekuasaan maupun kemakmuran.³⁹

Beberapa pendapat di atas telah dirasa cukup untuk menjadi dasar pijakan untuk melanjutkan penulisan rancangan penelitian ini. Tulisan-tulisan yang berupa buku-buku dan jurnal-jurnal yang terbit tentang Permesta yang ada sekarang, sejauh yang diketahui oleh penulis belum ada yang mengangkat tema tentang kehidupan

³⁸ Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodihardjo, *Ibid*, hlm. 128.

³⁹ Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodihardjo, *Ibid*, hlm. 129.

sehari-hari masyarakat dalam kondisi peperangan ketika itu.⁴⁰ Kehidupan masyarakat Bolaang Mongondow di tengah konflik Permesta sangat menarik untuk penelitian karena kita perlu mengetahui bagaimana masyarakat pada masa itu bertahan hidup di tengah kebijakan politik yang tidak pasti, sementara kebutuhan hidup sangat sulit diperoleh di tengah kondisi perang yang sewaktu-waktu mengancam jiwa masing-masing. Sehingga penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui lebih mendalam tentang hal-hal yang menjadi tujuan penelitian ini.

G. Metode Penelitian

Salah satu bagian penting dalam prinsip kerja ilmiah khususnya dalam bidang penelitian adalah menggunakan metode penelitian yang relevan dengan kajian ilmu pengetahuan tertentu jika hendak melakukan sebuah langkah penelitian. Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian sejarah, maka metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan prinsip-prinsip keilmuan dalam Metodologi Sejarah. Dalam kaitannya dengan ilmu sejarah, dengan sendirinya metode sejarah ialah “bagaimana mengetahui sejarah,” sedangkan metodologi ialah “mengetahui bagaimana mengetahui sejarah.”⁴¹

⁴⁰ Bahkan jika kita membaca dua Jurnal yang ditulis oleh Retno S. Mamoto tentang media-media barat yang meliput di Indonesia, Jurnalis-jurnalis Amerika kebanyakan hanya memuat berita tentang kondisi peperang untuk melancarkan propaganda, tanpa memuat berita tentang nasib rakyat ketika suasana pergolakan sedang berlangsung. Baca tulisan; (Retno S. Mamoto. *PRRI/permesta dalam empat media cetak di Amerika Serikat*. <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/90434-JSAM-IV-JanJul1999-50.pdf> (hlm. 50-55); Retno S. Mamoto Ph.D. *Perspektif Amerika hubungan Amerika - Indonesia: kasus PRRI dalam empat media cetak New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Time*. <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/90438-JSAM-IV-JanJul1999-123.pdf> (hlm. 123-144)).

⁴¹ Helius Samsuddin, (2012), *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta. Ombak, hlm. 12.

Buku-buku yang membahas tentang metodologi sejarah dewasa ini sudah banyak yang diterbitkan untuk kepentingan pengembangan kajian dan penelitian dibidang ilmu sejarah. Adapun mengenai tahapan-tahapan dalam penelitian ini, penulis merujuk kepada buku Helius Sjamsuddin⁴² mengenai apa dan bagaimana prosedur Metodologi Sejarah yang umum berlaku di kalangan sejarawan dewasa ini. Adapun prosedur penelitian yang digunakan yaitu:

Tahapan Pertama: Pengumpulan sumber (*Heuristik*) merupakan sebuah langkah awal dalam penelitian sejarah yang harus dilalui oleh setiap peneliti-peneliti sejarah. Adapun pengertian mendasar dari heuristik yang umum dikenal dikalangan sejarawan adalah seperti yang diungkapkan oleh Carrard dan Cf. Gee bahwa heuristik (*heuristics*) atau dalam bahasa Jerman *Quellenkunde*, sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, atau materi sejarah, atau evidensi sejarah.⁴³

Dalam tahapan pengumpulan sumber (*heuristik*). peneliti mencoba mengunjungi beberapa perpustakaan di Gorontalo di antaranya perpustakaan daerah, perpustakaan pusat Universitas Negeri Gorontalo, perpustakaan Jurusan Pendidikan Sejarah, dan melalui beberapa website perguruan tinggi di Indonesia antara lain website perpustakaan UGM, perpustakaan Universitas Indonesia, dan perpustakaan UPI untuk mencari beberapa jurnal yang membahas tentang Permesta. Beberapa buku juga berhasil didapatkan penulis atas bantuan beberapa dosen dan teman-teman senior di Jurusan Pendidikan Sejarah.

⁴² Helius Sjamsuddin, *Ibid*, hlm. 12.

⁴³ Carrard, dan Cf. Gee, dalam Helius Sjamsuddin, *Ibid*, hlm. 67.

Dalam penelitian ini melibatkan beberapa narasumber yang pernah merasakan langsung keadaan pergolakan Permesta sehingga pemahaman tentang sejarah lisan menjadi suatu hal yang harus benar-benar dikuasai peneliti. Hingga selesainya penyusunan penelitian ini, penulis sudah melakukan observasi yang dimulai sejak September 2015 lalu untuk mengumpulkan narasumber-narasumber yang nantinya bersedia untuk diwawancarai ketika sudah dalam proses penelitian nanti. Saat ini observasi masih dilakukan di beberapa wilayah desa dan kelurahan di Kotamobagu.

Tahapan Kedua: Kritik sumber (*Verifikasi*) umumnya dilakukan terhadap sumber-sumber pertama. Kritik ini menyangkut verifikasi sumber yaitu pengujian mengenai kebenaran atau ketepatan (akurasi) dari sumber itu. Dalam metode sejarah dikenal dengan cara melakukan kritik eksternal dan kritik internal.⁴⁴ Untuk itu Peneliti perlu menguraikan apa sebenarnya kritik eksternal dan kritik internal agar dalam penelitian ini benar-benar memenuhi syarat yang disepakati dalam Metodologi Sejarah.

1) Kritik eksternal ialah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek “luar” dari sumber sejarah.⁴⁵ Dalam tahapan ini kecermatan seorang sejarawan sangat dibutuhkan untuk membedakan sumber-sumber yang asli dan palsu sehingga dapat dijadikan sebagai bahan materi yang otentik untuk penelitian. Dalam rancangan penelitian ini, sumber-sumber yang didapat oleh

⁴⁴ Helius Sjamsuddin, *Ibid*, hlm. 103-104.

⁴⁵ Helius Sjamsuddin, *Ibid*, hlm. 104.

peneliti selama dilapangan dianggap masih memenuhi syarat untuk digunakan dalam penelitian.

- 2) Kritik internal merupakan kebalikan dari kritik eksternal seperti yang dijelaskan di atas. Kritik internal sebagaimana yang disarankan oleh istilahnya menekankan aspek “dalam” yaitu isi dari sumber: kesaksian (testimoni).⁴⁶ Dalam tahapan ini peneliti melihat sejauh mana sumber yang didapat bisa memberikan kesaksian secara jelas dan tidak bertentangan dengan suatu fakta yang sudah disepakati kebenarannya. Karena kebenaran fakta-fakta itu tergantung pada keberadaan evidensi empiris sehingga setiap pengamatan yang tertarik atau tidak memihak akan sependapat.⁴⁷

Tahapan Ketiga: Penafsiran (*Interpretasi*) merupakan bagian yang mendekati tahapan terakhir dalam penelitian sejarah. Interpretasi mengenai berbagai macam sumber yang telah didapatkan di lapangan sangat mempengaruhi hasil akhir dari penelitian. Hal ini karena proses interpretasi merupakan suatu hak tunggal peneliti berdasarkan sudut pandang dalam penulisannya. Dalam tahapan ini peneliti harus lebih dahulu memahami filsafat sejarah, karena ketika para sejarawan menulis, disadari atau tidak, diakui atau tidak, dinyatakan secara eksplisit atau implisit, mereka berpegang pada salah satu kombinasi beberapa filsafat sejarah tertentu yang menjadi dasar penulisannya. D.H. Fischer mengatakan bahwa

⁴⁶ Helius Sjamsuddin, *Ibid*, hlm. 112.

⁴⁷ Helius Sjamsuddin, *Ibid*, hlm. 16.

sejarawan mereka berusaha sebaik-baiknya untuk menceritakan cerita-cerita sebenarnya menurut topik-topik atau masalah-masalah yang mereka pilih.⁴⁸

Tahapan Keempat: Penulisan (*Historiografi*) merupakan suatu langkah peneliti untuk mencurahkan segala informasi dari hasil penelitian selama di lapangan. Tahapan akhir ini dapat terlaksana ketika peneliti telah berhasil melewati beberapa langkah proses dalam metode penelitian sejarah di atas. Ketika sejarawan memasuki tahap menulis, maka ia mengerahkan seluruh daya pikirannya, bukan saja keterampilan teknis penggunaan kutipan-kutipan dan catatan-catatan, tetapi terutama yang menggunakan pikiran-pikiran kritis dan analisisnya karena ia pada akhirnya harus menghasilkan suatu sintesis dari seluruh hasil penelitiannya atau penemuannya itu dalam suatu penulisan utuh yang disebut *historiografi*.⁴⁹

H. Sistematika Penulisan

Secara umum judul penelitian ini adalah *Permesta di Bolaang Mongondow Tahun 1956 – 1963 (Studi Sejarah Sosial – Politik)*. Dalam penelitian ini akan diuraikan bab dan sub-bab sebagai kerangka historiografi untuk mempermudah peneliti dalam tahap penyusunan skripsi atau hasil penelitian agar lebih tersusun secara sistematis. Uraian sistematika penulisan dalam skripsi ini antara lain:

Bab I menguraikan pendahuluan dengan sub-bab mulai dari latar belakang dan permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, tinjauan

⁴⁸ Helius Sjamsuddin, *Ibid*, hlm. 123

⁴⁹ Helius Sjamsuddin, *Ibid*, hlm. 121.

pustaka, kerangka teoretis dan pendekatan, metode penelitian, dan terakhir bagian sistematika penulisan.

Bab II menguraikan tentang Bolaang Mongondow masa awal pergolakan dengan sub-bab yang membahas tentang, letak geografis, perjuangan pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow 1950 – 1956, kondisi sosial – ekonomi tahun 1956, Yayasan Kopra Bolaang Mongondow, dan Bolaang Mongondow dalam pengaruh Permesta tahun 1957.

Bab III menguraikan tentang Permesta di Bolaang Mongondow, dengan sub-babnya antara lain mengenai situasi nasional tahun 1950 – 1957 proklamasi Permesta 2 Maret dan pengaruhnya di daerah 1957, situasi politik di Kotamobagu tahun 1958 – 1959, penangkapan para sangadi pro pusat di desa-desa 1958 – 1961, situasi masyarakat di tengah pergolakan 1958 – 1961, perlawanan rakyat terhadap Permesta tahun 1959 dan pembakaran di Kotamobagu tahun 1959.

Bab IV menguraikan dampak pergolakan Permesta, dengan sub-bab antara lain dampak pembakaran di Kotamobagu tahun 1959, opini masyarakat terhadap Permesta, dan eks Permesta setelah pergolakan

Bab V uraian penutup dengan sub-bab yang berisi kesimpulan pada penelitian.